



TANTANGAN DAN PELUANG PANCASILA SEBAGAI ETIKA ALTERNATIF BAGI KEWARGANEGARAAN GLOBAL

Sabri Anugrah Nasution¹, Sahwin Amrozi Nasution², Surya Hafiz Adrian Siregar³
Nur Hakima Akhirani⁴

¹ Institut Agama Islam Padang Lawas

² Institut Agama Islam Padang Lawas

³ Institut Agama Islam Padang Lawas

⁴ Institut Agama Islam Padang Lawas

Email: SabriAnugrah21@gmail.com ¹ sahwinamrozinasution@gmail.com ² suryahafiz036@gmail.com ³
Nurhakima1992@gmail.com ⁴

Abstract. *Globalization presents complex ethical challenges such as identity crises, economic inequality, and conflicts of values between civilizations. The concept of global citizenship offers a solution, but it tends to be abstract and dominated by Western perspectives. This article examines the opportunities and challenges of Pancasila as an alternative ethics for global citizenship. Using a qualitative approach with library research, this study analyzes literature on Pancasila values and global citizenship. The findings show that the five principles of Pancasila are relevant in addressing global challenges: Belief in God for interfaith dialogue, Just and Civilized Humanity for culture-based human rights, Indonesian Unity for multicultural coexistence, Democracy Led by Wisdom for deliberative democracy, and Social Justice for sustainable development ethics. Implementation challenges include the gap between ideals and practice in Indonesia, the dominance of Western paradigms, and education that remains indoctrinative. The opportunities lie in Pancasila's position as a "third way" between liberalism and communism, as well as its alignment with the SDGs agenda. This article concludes that Pancasila can serve as an ethical foundation for a more inclusive global citizenship rooted in local wisdom, provided there is internal commitment and systematic cultural diplomacy.*

Keywords: *alternative ethics; civic education; global citizenship; Pancasila*

Abstrak. Globalisasi menghadirkan tantangan etis kompleks seperti krisis identitas, ketimpangan ekonomi, dan konflik nilai antarbangsa. Konsep kewarganegaraan global menawarkan solusi, namun cenderung abstrak dan didominasi perspektif Barat. Artikel ini mengkaji peluang dan tantangan Pancasila sebagai etika alternatif bagi kewarganegaraan global. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis literatur tentang nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan global. Hasilnya menunjukkan kelima sila Pancasila relevan menjawab tantangan global: Ketuhanan untuk dialog antaragama, Kemanusiaan untuk HAM berbasis budaya, Persatuan untuk koeksistensi multikultural, Kerakyatan untuk demokrasi deliberatif, dan Keadilan Sosial untuk etika pembangunan berkelanjutan. Tantangan implementasinya meliputi kesenjangan nilai-praktik di Indonesia, dominasi paradigma Barat, dan pendidikan yang masih indoktrinatif. Peluangnya terletak pada posisi Pancasila sebagai "jalan ketiga" antara liberalisme dan komunisme, serta keselarasannya dengan agenda SDGs. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pancasila dapat menjadi fondasi etis bagi kewarganegaraan global yang inklusif dan berakar pada kearifan lokal, dengan syarat komitmen internal dan diplomasi budaya yang sistematis

Kata kunci: etika alternatif; global citizenship; kewarganegaraan global; Pancasila

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah menjadi fakta yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia modern. Arus informasi, perdagangan, dan pergerakan manusia yang melintasi batas-batas negara telah mengubah tatanan kehidupan secara mendasar.¹ Di satu sisi, globalisasi membawa peluang besar bagi kemajuan ekonomi, pertukaran budaya, dan peningkatan efisiensi di berbagai bidang. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan serius berupa krisis identitas, ketimpangan ekonomi, dan konflik nilai antar peradaban. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana masyarakat dunia dapat membangun tatanan global yang adil dan manusiawi di tengah arus perubahan yang demikian deras.

Kewarganegaraan global (*global citizenship*) hadir sebagai konsep yang menawarkan kerangka berpikir baru tentang hubungan antar individu dan bangsa di era global. UNESCO mendefinisikan kewarganegaraan global sebagai kesadaran akan tanggung jawab sosial, budaya, dan lingkungan di tingkat global, yang mencakup pemahaman terhadap isu-isu global serta partisipasi aktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun demikian, konsep ini seringkali dianggap terlalu abstrak dan kehilangan akar budaya karena cenderung didominasi oleh perspektif Barat. Pendidikan kewarganegaraan global membutuhkan landasan etis yang tidak hanya universal, tetapi juga menghormati keberagaman nilai dan tradisi lokal.²

Di sinilah Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, menawarkan perspektif yang menarik dan relevan. Pancasila dengan kelima silanya Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial memuat nilai-nilai universal yang justru menjadi jawaban atas krisis moral dunia saat ini. Prof. Dasim Budimansyah menyatakan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara dalam pengertian yuridis-formal, melainkan sistem nilai sosial, etika publik, dan kompas moral bangsa yang dapat menjadi inspirasi bagi tata dunia yang lebih damai dan

¹ Sumaryati, S. (2025). Opportunities and Challenges of Pancasila as an Alternative Ethics for Global Citizenship. *Proceedings of the 5th Annual Civic Education Conference (5th ACEC 2024)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research 909.

² Habibah, S. M., Anggaraini, R., Istianah, A., Sari, B. I., Listyaningsih, & Harmanto. (2025). Integrating Global Citizenship Education into Pancasila Education: Curriculum Review in Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*

manusiawi. Bahkan, Megawati Soekarnoputri dalam seminar internasional peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika menegaskan bahwa Pancasila adalah falsafah universal yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, ras, dan kepentingan ekonomi antarbangsa.

Karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan penyesuaian nilai-nilainya dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tanpa mengubah esensi dasarnya. Sifat inilah yang membuka peluang bagi Pancasila untuk berkontribusi sebagai landasan etika kewarganegaraan global. Lima sila Pancasila memberikan jembatan antara identitas nasional dan tanggung jawab global, memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan global memperkuat warisan budaya lokal daripada melemahkannya. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, misalnya, selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal, sementara sila Kerakyatan mengajarkan demokrasi deliberatif yang mengelola perbedaan tanpa harus berujung pada permusuhan.

Meskipun memiliki potensi besar, upaya menjadikan Pancasila sebagai etika alternatif bagi kewarganegaraan global tidaklah tanpa tantangan. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi otoritas bagi bangsa Indonesia itu sendiri di tengah gempuran nilai-nilai asing. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi keharusan agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol atau slogan, melainkan sungguh-sungguh menjadi laku hidup (*living Pancasila*).³ Selain itu, ada jebakan simbolisme, indoktrinasi, dan formalisme yang mengancam implementasi nilai-nilai Pancasila di ruang publik.

dari kajian ini terletak pada upaya sistematis untuk memposisikan Pancasila bukan sekadar ideologi nasional, melainkan sebagai etika alternatif yang menawarkan jalan tengah (*middle way*) dalam wacana kewarganegaraan global. Berbeda dengan

³ Budimansyah, D. (2026). Pancasila untuk Indonesia yang Rukun dan Dunia yang Damai: Dari Kesadaran Nilai Menuju Tindakan Kewargaan Global. *BERITA UPI*.

pendekatan liberal-individualistik yang dominan dalam literatur global citizenship, Pancasila menawarkan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual, hak individu dan tanggung jawab sosial, serta kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan literatur yang selama ini memperlakukan Pancasila dan Global Citizenship Education sebagai dua hal yang terpisah, padahal keduanya dapat saling memperkaya: Pancasila memberi akar, sementara wawasan global memberi cakrawala. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan konsep kewarganegaraan global yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global melalui "*normative entrepreneurship*" yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utamanya.⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan relevansi Pancasila sebagai etika alternatif bagi kewarganegaraan global, yang memerlukan interpretasi terhadap berbagai sumber tekstual dan konseptual. Studi kepustakaan merupakan metode yang tepat karena objek kajian utama penelitian ini adalah gagasan, konsep, dan nilai-nilai yang terdokumentasi dalam berbagai literatur, bukan data empiris di lapangan. Melalui metode ini, peneliti melakukan penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik yang diangkat, mulai dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, hingga prosiding seminar internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai: Landasan Konseptual

Pancasila merupakan sistem nilai yang lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai falsafah hidup sekaligus dasar negara.⁵ Sebagai sistem nilai, Pancasila tidak berdiri sendiri sebagai serangkaian prinsip abstrak, melainkan merupakan kesatuan organis yang saling menopang antarsila. Notonagoro menegaskan bahwa struktur hirarkis Pancasila bersifat piramidal, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral bagi seluruh sila yang ada di bawahnya.⁶

Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 menyatakan bahwa Pancasila merupakan philosophische grondslag dasar filsafat yang menampung semua elemen bangsa Indonesia yang beragam.⁷ Pernyataan ini mengandung makna mendalam bahwa Pancasila dirancang sebagai etika inklusif yang mampu mengakomodasi pluralitas tanpa mengorbankan kesatuan. Parsudi Suparlan lebih lanjut menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai adalah sistem abstrak yang mencerminkan nilai-nilai inti budaya Indonesia dan menjadi prinsip panduan bagi tatanan kehidupan bermasyarakat.⁸

Dalam perspektif etika normatif, Pancasila menggabungkan beberapa tradisi etika secara seimbang: etika religius (sila pertama), etika humanisme universal (sila kedua), etika komunitarian (sila ketiga dan keempat), serta etika keadilan distributif (sila kelima). Sintesis ini menjadikan Pancasila unik dibanding sistem etika Barat

⁵Kaelan, *Pendidikan Pancasila: Yuridis-Kenegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 72–80.

⁶Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 51.

⁷Soekarno, *Lahirnya Pancasila: Pidato Pertama tentang Pancasila* (Jakarta: BPUPKI, 1945), dikutip dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm. 7.

⁸Parsudi Suparlan, "Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu," dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No. 2, 2008, hlm. 113.

yang cenderung menekankan salah satu aspek, seperti liberalisme yang menonjolkan hak individu atau komunitarianisme yang mendahulukan kepentingan komunitas.⁹

B. Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Kewarganegaraan Global

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Dialog Antaragama Global

Dalam konteks global yang ditandai oleh meningkatnya radikalisme berbasis agama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menawarkan model toleransi yang unik. Berbeda dari sekularisme yang memisahkan agama dari ruang publik, Pancasila mengakui peran sentral nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial sekaligus mendorong penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda.¹⁰ Model ini relevan bagi kewarganegaraan global karena memungkinkan warga dunia untuk mempertahankan identitas religius mereka sambil tetap terbuka terhadap dialog lintas kepercayaan sebuah keseimbangan yang sulit dicapai dalam kerangka liberal-sekular murni.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai HAM Berbasis Budaya

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menunjukkan konvergensi yang kuat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Globalisasi, sebagaimana dianalisis oleh Giddens, bukan hanya tentang integrasi ekonomi tetapi juga tentang penyebaran nilai-nilai hak asasi manusia yang melampaui batas-batas negara.¹¹ Namun, pendekatan HAM yang bersifat top-down dan berakar pada tradisi Barat sering kali menghadapi resistensi di negara-negara berkembang yang memiliki pandangan berbeda tentang hubungan individu dan komunitas. Di sinilah sila kedua Pancasila menawarkan jalan tengah: ia mengakui martabat universal manusia (adil)

⁹Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), *Pedoman Umum Pemasyarakatan Pancasila* (Jakarta: BPIP, 2021), hlm. 9.

¹⁰Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

¹¹Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives* (London: Profile Books, 2002), hlm. 19.

sekaligus menekankan pentingnya peradaban dan budaya dalam mendefinisikan ekspresi martabat tersebut (beradab).¹²

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia sebagai Model Koeksistensi Multikultural

Indonesia dengan lebih dari 300 kelompok etnik, 700 bahasa, dan berbagai agama telah membuktikan bahwa persatuan dalam keberagaman bukan sekadar slogan ia adalah realitas yang terus diupayakan. Pengalaman Indonesia dalam mengelola pluralitas ini menawarkan pelajaran berharga bagi komunitas global yang semakin terfragmentasi.¹³ Tantangan multikulturalisme global yang diidentifikasi oleh Sjafrin Sairin yakni bagaimana menjaga kohesi sosial tanpa mengasimilasi atau menghapus identitas minoritas secara langsung direspons oleh nilai persatuan Pancasila yang merangkul keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman.¹⁴

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan sebagai Demokrasi Deliberatif

Sila Keempat Pancasila menawarkan model demokrasi yang melampaui prosedur elektoral semata. Konsep "musyawarah mufakat" yang menjadi inti sila ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya diskursus publik yang rasional dan inklusif sebagai basis legitimasi keputusan kolektif.¹⁵ Dalam konteks kewarganegaraan global, model deliberatif ini sangat relevan mengingat krisis representasi yang melanda demokrasi liberal di berbagai penjuru dunia.

¹²Reza Primadi, "Pancasila dan Kewarganegaraan Global: Titik Temu dan Perbedaan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 45.

¹³Sunarso, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi," *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 99–112.

¹⁴Sjafrin Sairin, "Pluralisme dan Kerukunan Sosial: Perspektif Kebudayaan," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pancasila dan Kewarganegaraan Global*, Yogyakarta: UGM, 2018, hlm. 32.

¹⁵Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Belknap Press, 2011), hlm. 33–34.

Sebagaimana diargumentasikan oleh Fukuyama, krisis demokrasi liberal kontemporer bersumber pada kegagalannya dalam mengakomodasi kebutuhan akan pengakuan identitas dan martabat.¹⁶ Model musyawarah Pancasila yang mengutamakan konsensus berbasis hikmat kebijaksanaan menawarkan mekanisme alternatif yang lebih mampu menjembatani perbedaan identitas.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai Etika Pembangunan Global

Sila kelima Pancasila berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks global, prinsip keadilan sosial ini dapat diperluas menjadi landasan etika pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.¹⁷ Ketimpangan global yang semakin melebar di mana 1% terkaya dunia menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia merupakan tantangan etis yang memerlukan respons sistemik. Sila kelima, dengan penekanannya pada distribusi keadilan yang merata, menawarkan basis normatif bagi tatanan ekonomi global yang lebih berkeadilan dibandingkan model neoliberal yang mendominasi wacana pembangunan saat ini.¹⁸

C. Tantangan Implementasi Pancasila sebagai Etika Kewarganegaraan Global

1. Tantangan Internal: Kesenjangan antara Nilai dan Praktik

Paradoks terbesar dalam upaya memproyeksikan Pancasila ke arena global adalah kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas praktiknya di Indonesia sendiri. Korupsi yang masih endemis, ketimpangan ekonomi yang persisten, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berulang menjadi hambatan legitimasi ketika Indonesia mengklaim Pancasila sebagai model etika global.¹⁹ Kesenjangan antara das

¹⁶Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018), hlm. 165.

¹⁷Bangbang Sunaryo, "Sila Keadilan Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, 2015, hlm. 337–350.

¹⁸Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: W.W. Norton, 2002), hlm. 214.

¹⁹Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 7.

Sollen (yang seharusnya) dan das Sein (yang ada) ini melemahkan daya persuasif Pancasila di mata komunitas internasional. Tantangan ini menuntut komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara untuk mewujudkan living Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tantangan Eksternal: Dominasi Paradigma Barat dalam Diskursus Global

Diskursus kewarganegaraan global masih didominasi oleh kerangka pemikiran liberal-Barat yang menempatkan hak individu sebagai nilai tertinggi dan menganggap sekularisme sebagai prasyarat demokrasi.²⁰ Dalam lingkungan intelektual seperti ini, nilai-nilai Pancasila yang lebih kolektivistis, religius, dan komunitarian seringkali dipandang dengan kecurigaan sebagai bentuk otoritarianisme tersembunyi atau relativisme budaya yang digunakan untuk menghindari tanggung jawab HAM.²¹ Mengatasi kecurigaan ini memerlukan upaya diplomasi budaya yang sistematis serta pengembangan narasi yang mampu menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya kompatibel dengan standar HAM internasional, tetapi juga menawarkan pengayaan terhadap pemahaman tentang HAM itu sendiri.

3. Tantangan Pedagogis: Transformasi Pancasila dari Indoktrinasi ke Internalisasi

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Pancasila sebagai etika kewarganegaraan global adalah mengubah paradigma pendidikan Pancasila dari model indoktrinasi ke model internalisasi. Pendekatan indoktrinatif yang pernah mendominasi pendidikan Pancasila era Orde Baru telah terbukti kontraproduktif: alih-alih menumbuhkan kesadaran Pancasilais, ia justru menimbulkan resistensi dan

²⁰Oxfam, *Education for Global Citizenship: A Guide for Schools* (Oxford: Oxfam GB, 2015), hlm. 4–5.

²¹Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm. 20.

sikap apatis terhadap nilai-nilai Pancasila.²² Kewarganegaraan global yang efektif membutuhkan warga yang memiliki kesadaran kritis dan kompetensi lintas budaya, bukan hafalan dogma.²³

D. Peluang Pancasila sebagai Etika Alternatif Kewarganegaraan Global

1. Pancasila sebagai "Third Way" dalam Dikotomi Liberalisme dan Komunisme

Salah satu peluang terbesar Pancasila dalam arena global adalah posisinya sebagai jalan ketiga (third way) di antara dua ekstrem ideologi yang telah lama mendominasi wacana politik dunia: liberalisme individualistik di satu sisi dan komunisme kolektivistik di sisi lain.²⁴ Di era pasca-Perang Dingin yang ditandai oleh kegagalan baik liberalisme neoliberal maupun model sosialisme otoriter dalam mengatasi ketimpangan global, Pancasila menawarkan sintesis yang otentik: menghormati hak individu dalam kerangka tanggung jawab komunal, menjaga kedaulatan nasional dalam semangat solidaritas antarbangsa, dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kemajuan material.²⁵

2. Relevansi Pancasila bagi Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015 mencakup dimensi yang sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila. SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) mencerminkan semangat sila keempat dan kelima Pancasila.²⁶ Keselarasan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memosisikan Pancasila sebagai framework

²²Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, edisi ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28–30.

²³Morais, D. B. & Ogden, A. C., "Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale," *Journal of Studies in International Education*, 15(5), 2011, hlm. 445–466.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 47.

²⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 386–392.

²⁶UNESCO, *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives* (Paris: UNESCO, 2015), hlm. 14–15.

etis yang mendukung agenda global SDGs, sekaligus memberikan dimensi lokal-kultural yang selama ini kurang dalam implementasi SDGs yang cenderung bersifat teknis-ekonomis.²⁷

3. Pancasila sebagai Sumber "Normative Entrepreneurship" Indonesia

Konsep normative entrepreneurship dalam hubungan internasional merujuk pada upaya aktor negara untuk mempromosikan norma-norma tertentu di arena global.²⁸ Indonesia memiliki rekam jejak penting dalam hal ini: sebagai salah satu pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya sebagai negara yang tidak hanya mengikuti norma global tetapi juga turut membentuknya. Dalam konteks kontemporer, Pancasila dapat menjadi basis normatif bagi normative entrepreneurship Indonesia yang lebih ambisius mendorong reformasi tata kelola global agar lebih inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman peradaban.²⁹

4. Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan Global: Integrasi Lokal-Global

Oxfam mendefinisikan warga global yang efektif sebagai individu yang sadar akan dunia yang lebih luas, menghargai keberagaman, berkomitmen pada keadilan sosial, dan berpartisipasi dalam komunitas pada berbagai tingkatan dari lokal hingga global.³⁰ Definisi ini sangat kompatibel dengan visi kewarganegaraan yang diusung Pancasila. Model pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan kompetensi kewarganegaraan global dapat menghasilkan warga negara yang memiliki kedalaman identitas lokal sekaligus keluasan wawasan global perpaduan

²⁸Megawati Soekarnoputri, "Pancasila sebagai Falsafah Universal," makalah disampaikan pada Seminar Internasional Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Bandung, April 2015.

²⁹Dasim Budimansyah, *Revitalisasi Pembelajaran Demokrasi dan Kewarganegaraan* (Bandung: Genesindo, 2010), hlm. 23.

yang justru menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi yang sarat dengan krisis identitas.³¹

E. Sintesis: Model Integrasi Pancasila-Kewarganegaraan Global

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan sebuah model integrasi yang menempatkan Pancasila sebagai fondasi etis bagi pendidikan kewarganegaraan global. Model ini bertumpu pada tiga pilar utama: pertama, pilar identitas, di mana nilai-nilai Pancasila memperkuat akar identitas nasional-kultural sebagai bekal menghadapi dunia global; kedua, pilar kompetensi, di mana pendidikan kewarganegaraan global mengembangkan keterampilan berpikir kritis, literasi lintas budaya, dan kemampuan berpartisipasi dalam diskursus global; dan ketiga, pilar komitmen, di mana internalisasi nilai Pancasila mendorong warga negara untuk berkomitmen pada keadilan sosial baik di tingkat lokal maupun global.³²

Model ini mengisyaratkan bahwa Pancasila dan kewarganegaraan global bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi. Pancasila memberikan akar nilai yang membumi, sementara wawasan kewarganegaraan global memberikan cakrawala yang memungkinkan nilai-nilai tersebut berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih baik.³³ Dengan demikian, warga Indonesia yang sepenuhnya menghayati nilai-nilai Pancasila justru akan menjadi warga dunia yang lebih baik bukan karena meninggalkan identitas nasional mereka, melainkan justru karena mengekspresikannya secara penuh dalam keterlibatan global.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa Pancasila memiliki potensi yang signifikan sebagai etika alternatif bagi kewarganegaraan global. Kelima sila Pancasila

³³Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masing-masing menawarkan respons yang relevan terhadap tantangan-tantangan utama era globalisasi, mulai dari konflik antaragama hingga krisis demokrasi dan ketimpangan ekonomi global.

Pancasila menawarkan pendekatan yang berbeda dari dominasi paradigma liberal-individualistik dalam wacana kewarganegaraan global. Dengan menyeimbangkan dimensi spiritual dan material, hak individu dan tanggung jawab komunal, serta kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa, Pancasila menyediakan fondasi etis yang lebih komprehensif dan inklusif untuk membangun tatanan dunia yang adil dan berkelanjutan.

Meski demikian, terwujudnya peran Pancasila sebagai etika kewarganegaraan global mensyaratkan dua hal fundamental: ke dalam, komitmen Indonesia untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional sehingga menjadi living Pancasila; ke luar, strategi diplomasi budaya dan normative entrepreneurship yang sistematis untuk memperkenalkan kontribusi Pancasila bagi wacana etika global. Dengan memenuhi kedua prasyarat ini, Indonesia dapat berperan sebagai jembatan peradaban menghubungkan keragaman nilai lokal dengan cita-cita universal kemajuan umat manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bangbang Sunaryo. "Sila Keadilan Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2015): 337–350.
- Budimansyah, D. (2026). Pancasila untuk Indonesia yang Rukun dan Dunia yang Damai: Dari Kesadaran Nilai Menuju Tindakan Kewargaan Global. *BERITA UPI*.
- Budimansyah, Dasim. *Revitalisasi Pembelajaran Demokrasi dan Kewarganegaraan*. Bandung: Genesindo, 2010.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fukuyama, Francis. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.
- Giddens, Anthony. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books, 2002.
- Habibah, S. M., Anggaraini, R., Istianah, A., Sari, B. I., Listyaningsih, & Harmanto. (2025). Integrating Global Citizenship Education into Pancasila Education: Curriculum Review in Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*
- Huntington, Samuel. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila: Yuridis-Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Morais, D. B. & Ogden, A. C. "Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale." *Journal of Studies in International Education*, 15(5) (2011): 445–466.
- Mulyasa. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.
- Nussbaum, Martha. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Belknap Press, 2011.
- Oxfam. *Education for Global Citizenship: A Guide for Schools*. Oxford: Oxfam GB, 2015.
- Parsudi Suparlan. "Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu." *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No. 2 (2008): 113–125.

- Primadi, Reza. "Pancasila dan Kewarganegaraan Global: Titik Temu dan Perbedaan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (2017): 40–52.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton, 2002.
- Sumaryati, S. (2025). Opportunities and Challenges of Pancasila as an Alternative Ethics for Global Citizenship. *Proceedings of the 5th Annual Civic Education Conference (5th ACEC 2024)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research 909.
- Sunarso. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi." *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 2 (2009): 99–112.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Edisi ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.